



**Laporan Bulanan Sekretariat Utama
Bulan Februari
2025**

KATA PENGANTAR

Akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu penting karena bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga pemerintah mengimplementasikan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Aplikasi SAKIP ini digunakan untuk mengobservasi dan menilai kinerja suatu instansi pemerintah. Badan Pangan Nasional menggunakan aplikasi SAKIP sebagai bentuk komitmen Badan Pangan Nasional kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta dapat mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil atas setiap rupiah dari anggaran yang dipergunakan. Sekretariat Utama yang bertugas mendukung manajemen Badan Pangan Nasional wajib mengisi aplikasi SAKIP. Pengisian aplikasi SAKIP ini dilakukan secara bertahap dimulai dengan aktualisasi program atau kegiatan di Sekretariat Utama di sepanjang tahun 2025. Tahap berikutnya menyusun Laporan Bulanan Sekretariat Utama yang berisi aktualisasi dari aktivitas, program dan kegiatan yang terjadi di Badan Pangan Nasional. Laporan ini disusun secara bulanan sehingga pelaporan kegiatan atau program yang sudah berlangsung di bulan itu. Selain itu, bahan dan data yang dipakai pada aplikasi SAKIP ini menggunakan instrumen penilaian yang berpatokan dengan implementasi dan realisasi kegiatan atau program yang dilaksanakan. Hasil dari dokumen ini dapat digunakan sebagai referensi untuk laporan bulan berikutnya. Sekretariat utama mendapatkan alokasi berdasarkan aturan alokasi dalam BA 125 milik Badan Pangan Nasional dan uraian alokasi untuk Program Dukungan Manajemen serta diprioritaskan untuk pembayaran honor dan operasional kantor. Pemantauan atas penggunaan alokasi yang aturan dalam bulan Februari tahun 2025 harus tetap terlaksana agar efisien dan efektif. Kami berharap laporan ini bisa berguna untuk seluruh pihak dan sebagai referensi buat pemugaran aplikasi aktivitas kedepan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat kami harapkan pada rangka menyajikan laporan.

Jakarta, Maret 2025



Sarwo Edhy

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I: Pendahuluan	1
1.1 Latar belakang	2
1.2 Tujuan	4
1.3 Metodologi Penyusunan Laporan	4
BAB II: Rencana Kerja Output	5
BAB III: Pelaksanaan Kegiatan	8
3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan	9
4.1 Kesimpulan	26
4.3 Rekomendasi	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan Februari 2025 Sesuai DIPA Revisi ke-1 Tanggal 21 Februari 2025	6
Tabel 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Februari Tahun 2025 Per Output dan Komponen Lingkup Sekretariat Utama	9
Tabel 3. Realisasi Keuangan Bulan Februari Tahun 2025 Per Kegiatan Lingkup Badan Pangan Nasional	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Realisasi dan Target Sekretariat Utama Tahun 2025 11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. DIPA Revisi 1 – 21 Februari 2025.....	27
Lampiran 2. Realisasi Sekretariat Utama Bulan 2025.....	28

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan untuk masyarakat. Hal ini tergambar dari Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 yang menyatakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan yang dipercaya masyarakat perlu mengatur akan kebijakan terhadap pangan. Pemerintah mengatur tentang kebijakan pangan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dijelaskan tentang tugas, susunan badan, dan tata kelola dari Badan Pangan Nasional.

Fungsi yang diutamakan untuk Badan Pangan Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 adalah koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan. Oleh sebab itu, Badan Pangan Nasional berfokus untuk mengatur kebijakan di bidang pangan. Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan BUMN di bidang pangan dalam mengerjakan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah, Badan Pangan Nasional berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola sistem pangan nasional yang transparan, akuntabel, loyal dan berkelanjutan serta berkoordinasi dengan instansi-instansi lain baik itu kementerian-kementerian lain maupun universitas-universitas untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan sebagaimana visi Badan Pangan Nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022.

Pada tahun 2025 Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu:

1

Pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;

2

Pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi;

3

Pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan

4

Dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional.

Sekretariat Utama

Laporan bulanan dibuat Badan Pangan Nasional secara periodik sebagai bentuk implementasi instansi negara yang bertanggung jawab atas anggaran yang digunakan untuk membantu masyarakat. Laporan ini digunakan sebagai salah satu instrumen dalam pemantauan, jejak program atau kegiatan yang telah terlaksana dan evaluasi yang menggambarkan pencapaian dan bentuk realisasi terhadap target kinerja organisasi dalam periode bulanan. Pemantauan dan evaluasi menjadi penting untuk memastikan pencapaian target dapat berjalan sesuai yang ditetapkan, mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan sebagai upaya untuk mengantisipasi atau mengidentifikasi permasalahan yang akan timbul di periode mendatang.

Hasil atas peninjauan dan evaluasi serta bentuk pertanggungjawaban atas pemanfaatan dan pendayagunaan anggaran kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional pada bulan Februari 2025

dituangkan dalam bentuk laporan peninjauan dan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat Utama bulan Februari 2025. Laporan ini sebagai catatan dokumentasi realisasi fisik dan keuangan selama bulan Februari 2025 serta hasil evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan output lingkup Sekretariat Utama tahun 2025 baik fisik maupun keuangan. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan dan merepresentasikan program-program dan kegiatan-kegiatan di lingkup Sekretariat Utama di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Sekretariat Utama pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan laporan, diantaranya:

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Sekretariat Utama periode bulan Februari 2025.
2. Melakukan pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan berdasarkan target periode bulan Februari 2025.

1.3 Metodologi Penyusunan Laporan

Metodologi penyusunan laporan meliputi:

1. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian program, kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) dari Unit Kerja Eselon (UKE) 1 dan UKE 2 dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.

BAB II
RENCANA KINERJA OUTPUT

Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja pada Sekretariat Utama selama tahun 2025. Rencana kinerja output pada bulan Februari 2025 akan dilihat dari dukungan pencapaian Rincian Output (RO) dan komponen sebagaimana target sesuai lembar III DIPA Revisi ke-1 pada bulan Februari 2025. Pada dokumen tersebut pada bulan Februari ditargetkan sebesar 4,23% Target tersebut sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan Februari 2025 Sesuai DIPA Revisi ke-1

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen		Alokasi Tahun 2025		Target Februari th. 2025	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan 4,23% (Rp)	Fisik
WA-Program Dukungan Manajemen		110,754,211,000		4.684.882.115	-
6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional					
AEC-Kerja sama	Kerja Sama Bidang Pangan	924,972,000		39,126,316	
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	525,011,000		22,207,965	
	Layanan Hukum	686,492,000		29,038,612	
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2,673,720,000		113,098,356	
	Layanan Protokoler	580,600,000		24,559,380	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,270,261,000		53,732,040	
	Layanan Umum	7,844,720,000		331,831,656	
	Layanan Perkantoran	78,698,135,000		3,328,931,111	
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	1,314,054,000		55,584,484	

.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	1,887,686,000		79,849,118	
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6,129,682,000		79,849,119	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	771,904,000		32,651,539	
	Layanan Manajemen Keuangan	1,394,046,000		58,968,146	
	Layanan Audit Internal	2,327,594,000		98,457,226	
PAD-Peraturan Presiden	Rperpres tentang Rencana Pangan Nasional	270,775,000		11,453,783	
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pangan	3,232,560,000		136,737,288	
UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	221,999,000		9,390,558	

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari 53 output/RO dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 275,718,455,000,-** untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Realisasi keuangan pada bulan Februari Tahun 2025 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan disajikan per belanja dan per kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional sebagaimana tabel 2 dan tabel 3 berikut:

Tabel 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Februari Tahun 2025 Per Output dan Komponen Lingkup Sekretariat Utama

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen		Target (4,23%)		Realisasi (SP2D)	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
WA-Program Dukungan Manajemen					
6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional		4,684,903,125	-	8,406,184,240	-
AEC-Kerja sama	Kerja Sama Bidang Pangan	39,126,316		1,458,000	
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	22,207,965		45,580,000	
	Layanan Hukum	29,038,612		11,185,000	
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	113,098,356		115,821,815	
	Layanan Protokoler	24,559,380		113,039,052	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	53,732,040		24,258,000	
	Layanan Umum	331,831,656		413,319,652	

	Layanan Perkantoran	3,328,931,111		6,618,948,565	
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	55,584,484		0	
.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	79,849,118		15,187,500	
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	259,285,549		85,935,593	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	32,651,539		32,379,267	
	Layanan Manajemen Keuangan	58,968,146		265,652,900	
	Layanan Audit Internal	98,457,226		418,928,284	
PAD-Peraturan Presiden	Rperpres tentang Rencana Pangan Nasional	11,453,783		0	
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pangan	136,737,288		2,089,035,125	
UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	9,390,558		25,455,487	

Tabel 3. Realisasi Keuangan Bulan Februari Tahun 2025 Per Kegiatan Lingkup Badan Pangan Nasional

Program dan Kegiatan	Target 4,23% (Rp)	Realisasi SP2D (Rp)	% (Dari Target)
Badan Pangan Nasional	6,710,161,137	9,977,745,098	148.70%
HA-Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2,025,258,012	1,571,560,858	77.60%
WA-Program Dukungan Manajemen	4,684,903,125	8,406,184,240	179.43%

Dari tabel 3 diatas, realisasi keuangan Program Dukungan Manajemen melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama Bulan Februari Tahun 2025 telah terealisasi sebesar **Rp. 8,406,184,240 (179.43%)** dari target sebesar **Rp. 4,684,903,125 (4.23%)**. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka target, realisasi dan PAGU WA-Program Dukungan Manajemen akan terlihat pada grafik berikut:



Gambar 1. Realisasi dan Target Sekretariat Utama Tahun 2025

3.2 Monitoring Kegiatan Prioritas

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional, Kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat Utama pada periode bulan Februari Tahun 2025 telah ter-realisis anggaran sebesar 2,460,314,524 dengan prioritas kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

Sekretaris Utama

1. 4 Februari 2025 - Jelang Ramadan, Badan Pangan Nasional Pastikan Ketersediaan Pangan Aman



JAKARTA – Menjelang bulan suci Ramadan, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) memastikan bahwa ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR-RI, Selasa (4/2/2025) menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis guna menjaga ketersediaan pangan, stabilitas pasokan, dan harga pangan, termasuk penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

“Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan periode Januari dan Desember 2025 (update 21 Januari), secara umum ketersediaan 12 komoditas pangan strategis diproyeksikan aman dan cukup,” papar Arief.

Khusus untuk beras, dengan adanya carry over stock di awal tahun 2025 sebesar 8 juta ton, bisa dipastikan kebutuhan pangan untuk masyarakat tidak akan mengalami kekurangan.

Sementara itu, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog sebesar 1,9 juta ton yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga memudahkan pemerintah untuk melakukan intervensi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras di berbagai daerah.

Di sisi lain, rata-rata nasional harga gabah di tingkat produsen sudah mencapai Rp 6.498 per kilogram (kg). Ini mulai mendekati Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kg sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mendorong upaya perwujudan swasembada beras.

“Secara umum harga pangan nasional menunjukkan angka yang stabil, namun ada beberapa komoditas di tingkat produsen yang masih di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) di antaranya jagung pipil kering, bawang merah, dan daging ayam ras. Sedangkan di tingkat konsumen komoditas harga yang di atas HAP/HET di antaranya MinyakKita, cabai rawit merah, cabai merah keriting, dan beras medium,” tambah Arief.

Proyeksi Neraca Pangan juga menunjukkan bahwa ketersediaan pangan nasional tahun 2025 berada dalam kondisi yang terkendali. Beberapa komoditas utama seperti beras, jagung, dan daging sapi memiliki stok yang mencukupi. Stok akhir beras diproyeksikan mencapai 9,97 juta ton, stok jagung 5,1 juta ton, sementara stok daging sapi-kerbau mencapai 42.867 ton.

Sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan konsumen, pemerintah telah menetapkan HPP untuk gabah dan beras. HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kg, sementara harga beras di gudang Perum Bulog sebesar Rp 12.000 per kg.

Dengan langkah-langkah strategis ini, NFA optimis bahwa kebutuhan pangan selama Ramadan dan seterusnya akan tetap terpenuhi dengan harga yang stabil, memastikan kesejahteraan petani, pedagang, dan masyarakat luas.

2. 6 Februari 2025 - Menyongsong Swasembada Pangan, Kebijakan Harga GKP Lecut Petani Semangat Terus Menanam



Upaya pemerintah yang dikomandoi Presiden Prabowo Subianto dalam mengejar swasembada pangan sudah mulai dikebut secara kolaboratif. Dalam mendukung itu, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) telah menetapkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dan beras di gudang Perum Bulog.

Menurut Plt. Sekretaris Utama NFA Sarwo Edhy, implementasi kebijakan harga itu akan melecut kalangan petani padi agar lebih bersemangat menanam. "Kami berusaha membantu agar petani lebih semangat menanam. Salah satunya dengan kebijakan harga gabah di Rp 6.500 per kilogram," katanya saat berbicara dalam diskusi 'Menyongsong Swasembada Pangan 2027' yang diadakan oleh Forum Wartawan Pertanian di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

"Kami sudah menugaskan Bulog untuk menyerap minimal 3 juta ton setara beras pada panen raya ini. Dengan harga ini diharapkan para petani akan terus semangat menanam, petani akan kembali ke sawah. Tentunya pemerintah daerah juga perlu mengawal ini di wilayahnya masing-masing.

Selanjutnya Sarwo menyatakan dukungannya terhadap upaya eskalasi produksi beras yang bersumber dari dalam negeri. Baginya, pencapaian swasembada pangan yang ideal adalah disokong dari kekuatan bangsa sendiri.

"Definisi swasembada pangan menurut FAO, kalau suatu negara sudah bisa memenuhi 90 persen dari dalam negeri, tapi alangkah baiknya apabila semuanya dipenuhi dari produksi dalam negeri sampai 100 persen. Jadi kuncinya adalah produksi dalam negeri. Semoga target produksi beras di 2025 ini benar-benar dapat tercapai," sebutnya.

Lebih lanjut, dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2025 yang disusun NFA, untuk beras diestimasikan total produksi dalam negeri di angka 32,29 juta ton. Dengan stok awal 2025 berada di angka 8,1 juta ton maka total ketersediaan beras dapat mencapai 40,95 juta ton.

Sementara proyeksi total kebutuhan konsumsi selama setahun di angka 30,97 juta ton. Dengan itu diproyeksikan pada akhir 2025, stok beras nasional masih ada sejumlah 9,97 juta ton. Jika ini tercapai stok akhir 2025 meningkat 22,46 persen dibandingkan akhir 2024. Oleh karena itu, Indonesia memutuskan tidak mengimpor beras di tahun ini.

3. 19 Februari 2025 - Pantau Pangan di Yogyakarta, Pemerintah Siapkan Langkah Stabilisasi Pangan Hadapi Ramadan



YOGYAKARTA - Menjelang Ramadan 1446 H, Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (NFA), Sarwo Edhy bersama Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pasar Beringharjo, Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, pada Rabu (19/2/2025). Kunjungan ini bertujuan memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan dan harga pangan menghadapi momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan.

Dalam pemantauan di lapangan, sejumlah komoditas pangan terpantau dalam kondisi pasokan yang cukup dengan harga yang masih dalam rentang wajar. Beberapa harga komoditas di Pasar Beringharjo antara lain minyak goreng curah Rp 17.500 per liter, Minyak Kita Rp 16.000 per liter, daging ayam Rp 35.000 per kilogram (kg), dan telur ayam yang mengalami sedikit kenaikan dari harga rata-rata Rp 26.500 per kg menjadi Rp 27.500 per kg. Sementara itu, harga daging sapi berada di Rp 130.000 per kg, bawang merah Rp 28.500 per kg, bawang putih Rp 38.500 per kg, cabai merah keriting Rp 43.500 per kg, cabai merah besar Rp 52.000 per kg, dan gula konsumsi Rp 17.500 per kg.

Komoditas beras juga menjadi perhatian dalam tinjauan ini. Harga beras premium di pasar terpantau Rp 14.000 per kg, beras medium Rp 13.000 per kg, dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Rp 12.500 per kg atau Rp 62.500 per sak isi 5 kg.

Sarwo Edhy mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan pasokan dan harga pangan hal ini sejalan dengan arahan Kepala NFA yang mengatakan agar masyarakat dapat menjalani ibadah puasa dengan tenang. "Saat Ramadan dan Idulfitri, biasanya terjadi peningkatan permintaan pangan yang tentunya harus diantisipasi agar inflasi khususnya inflasi pangan tetap terjaga. Oleh karena itu, kita harus memastikan distribusi berjalan lancar dan harga tetap terjangkau," ujarnya.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan pentingnya koordinasi antarinstansi untuk menjaga stabilitas pangan, terutama dalam menghadapi periode HBKN,

"Nah hari ini, saya memimpin ke Yogyakarta dan meninjau ke Pasar Beringharjo untuk mengetahui harga-harga kebutuhan pokok, apakah ada lonjakan atau tidak? Karena ini, kita sudah akan memasuki bulan Ramadan. Ternyata yang naik hanya cabai naik sedikit mudah-mudahan turun lagi yang lainnya turun seperti sayur." katanya.

Titiek berharap, menjelang bulan Ramadan ini tidak terjadi lonjakan harga bahan pokok yang signifikan. Namun apabila itu terjadi, pemerintah daerah bersama Bulog akan segera mengatasi.

"Mudah-mudahan enggak ada lonjakan. Kalau toh ada lonjakan harga mudah-mudahan Bulog atau pemerintah bisa cepat turun tangan mengatasi lonjakan harga tersebut," jelasnya.

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional akan terus melakukan pemantauan di berbagai daerah serta memperkuat program Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk memastikan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi usai menghadiri Rakortas Kemenko Pangan, Rabu (19/2/2025) di Jakarta mengungkapkan, gelaran

operasi pasar melalui Gerakan Pangan Murah akan dilaksanakan secara masif sepekan sebelum Ramadan di seluruh daerah dengan kolaborasi dari seluruh stakeholder pangan.

Dalam Kunjungan ini turut hadir Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, anggota Komisi IV DPR RI Paolus Hadi, Agus Ambo Djiwa, I Ketut Suwendra, Alien Mus, Hanan A.Rozak, Dadang M. Naser, Endang Setyawati Thohari, Kartika Sandra Desi, Rajiv, Cindy Monica Salsabila Setiawan, Hindun Anisah, Herry Dermawan, Ajbar, Bambang Purwanto, Ellen Esther Pelealu, Wakil Direktur Utama Perum BULOG Marga Taufiq, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (persero) Rahmad Pribadi, Direktur Utama PT RNI/ ID FOOD Sis Apik Wijayanto, Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian Idha Widi Arsanti.

4. 19 Februari 2025 - NFA Dampingi Komisi IV DPR RI Tinjau Stok Beras Di Yogyakarta



Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (NFA), Sarwo Edhy, bersama Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Gudang BULOG Purwomartani, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Rabu (19/2/2025), Untuk meninjau stok beras yang belum terdistribusi.

Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memastikan ketersediaan pangan dan efektivitas distribusi beras yang dikelola oleh Perum BULOG.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, dalam kesempatan tersebut menyoroti adanya stok beras yang masih belum tersalurkan. " Ini sekarang kita digudang BULOG melihat ketersediaan BULOG, berasnya berapa? Ternyata masih banyak berasnya disini dan tadi kita lihat masih ada beras impor, ada stok beras impor yang belum terdistribusi yang masih ada di gudang, ini kita minta supaya segera disalurkan lah gitu ya, kalau nggak nanti bisa turun mutu, dan sebagainya sehingga tidak bisa di konsumsi lagi," ujar Siti Hediati.

Dalam diskusi yang berlangsung, Sarwo Edhy mengungkapkan bahwa Badan Pangan Nasional telah mengusulkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas pangan, termasuk program bantuan pangan beras sebesar 16 juta ton serta target penyaluran beras SPHP tahun 2025 sebesar 1,2 juta ton. Namun, berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas (Rakortas) Bidang Pangan, distribusi beras sementara ditangguhkan mengingat saat ini sedang berlangsung musim panen.

"Hal menarik waktu diskusi kaitan dengan beras yang tersimpan, jadi memang kita ketahui dari Badan Pangan Nasional sudah mengusulkan dan dengan adanya bantuan pangan beras 16 juta ton dan target penyaluran beras SPHP tahun 2025 1,2 juta ton. Berdasarkan hasil rakortas sementara di tangguhkan karna sedang musim panen, dengan kekhawatiran bahwa kalau bantuan pangan banyak dan SPHP diluncurkan harga gabah akan menurun," jelas Sarwo Edhy.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama Perum BULOG, Marga Taufiq, memaparkan pencapaian pengadaan beras hingga pertengahan Februari 2025. Menurutnya, hingga 16 Februari, total pengadaan beras PSO dan komersial telah mencapai 96.314 ton. "Jika dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya, capaian ini jauh lebih tinggi. Pada Februari 2024, pengadaan beras hanya sekitar 9.000 ton, sedangkan tahun ini sudah

mencapai 81.000 ton atau naik sembilan kali lipat. Inshaallah, target pengadaan sebesar 3 juta ton hingga 30 April nanti dapat tercapai," ujar Marga Taufiq.

Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan kualitas beras bagi masyarakat, sekaligus memastikan bahwa stok yang ada dapat segera didistribusikan untuk menghindari potensi penurunan mutu akibat penyimpanan yang terlalu lama.

5. 25 Februari 2025 - Sestama NFA Ajak Semua Pihak Dukung Swasembada Pangan



Jakarta, 24 Februari 2025 – Badan Pangan Nasional (NFA) menegaskan tekadnya untuk mendukung tercapainya swasembada pangan. Plt. Sekretaris Utama NFA, Sarwo Edhy, mengungkapkan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci utama dalam mendukung pencapaian swasembada pangan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam Bimbingan Teknis Nasional DPRD Fraksi Partai Demokrat tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang berlangsung di Hotel RedTop, Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025.

"Swasembada pangan merupakan program strategis yang menjadi prioritas utama bagi Presiden Prabowo Subianto, pencapaian swasembada pangan

harus didukung oleh semua elemen bangsa, termasuk para kader Partai Demokrat yang memiliki peran penting di legislatif," ujar Sarwo.

"Sebagai negara yang berkomitmen menjadi lumbung pangan dunia, Indonesia memiliki potensi besar yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Pengalaman dan kapabilitas kita dalam sektor pangan dan pertanian harus dijadikan modal untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut," lanjut Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy juga menekankan bahwa pencapaian swasembada pangan bukan hanya soal ketahanan pangan, tetapi juga sebagai pondasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. "Kami berharap kader Partai Demokrat, terutama yang memiliki amanah sebagai wakil rakyat, dapat memperkuat upaya ini dengan memberikan dukungan nyata melalui kebijakan yang mengarah pada stabilitas pasokan dan harga pangan," ujarnya.

Melalui berbagai program yang digagas oleh Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy yakin bahwa peran serta kader Partai Demokrat dapat menjadi kunci dalam mengatasi tantangan besar ketahanan pangan yang dihadapi bangsa ini. "Kader Demokrat di legislatif harus menjadi bagian dari solusi konkret untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, demi kesejahteraan rakyat Indonesia," pungkasnya.

Lebih lanjut, Sarwo Edhy menekankan pentingnya kompetensi dan pemahaman mendalam terkait isu pangan yang saat ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. "Kader Partai Demokrat harus mampu menguasai substansi kebijakan pangan, serta aktif berperan dalam merumuskan solusi untuk memastikan keberlanjutan pasokan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia," lanjutnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, NFA terus mendorong para wakil rakyat, termasuk kader Partai Demokrat, untuk bersama-sama merumuskan langkah konkret dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

6. 27 Februari 2025 - Sambut Ramadan, Badan Pangan Nasional Serukan Gerakan Selamatkan Pangan



JAKARTA - Upaya penyelamatan pangan terus digencarkan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama mitra pentahelix di pusat dan daerah dalam rangka mendukung ketahanan pangan serta pencegahan dan pengurangan Susut dan Sisa Pangan (SSP) atau Food loss and waste.

Plt. Sekretaris Utama NFA Sarwo Edhy mengungkapkan pentingnya kolaborasi dan komitmen untuk mengatasi permasalahan susut dan sisa pangan.

"Hal ini penting untuk kita dorong bersama agar kita sama-sama dapat mencegah terjadinya kemubaziran pangan, terlebih sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Ini momentum yang baik bagi semua pihak untuk berkolaborasi menurunkan angka food waste." ujar Sarwo dalam Konsolidasi Kegiatan Gerakan Selamatkan pangan Tahun 2025 yang digelar secara daring pada Kamis (27/2/2025).

Kegiatan konsolidasi ini dihadiri secara daring oleh seluruh dinas yang menangani urusan pangan 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

"Kehadiran pemerintah baik pusat dan daerah bersifat strategis dalam mengoordinasikan, menetapkan kebijakan dan menyosialisasikan Gerakan

Selamatkan Pangan serta melakukan upaya intervensi sebagai modelling bagi masyarakat”, tambah Sarwo.

Adapun Gerakan Selamatkan Pangan yang telah diinisiasi NFA sejak tahun 2022 terus digencarkan dalam upaya mencegah dan mengurangi SSP. Berdasarkan laporan Bappenas 2021, timbulan SSP di Indonesia mencapai 23 – 48 juta ton, dan menurut KLHK (2024) sampah makanan cenderung mengalami peningkatan 10 hingga 20 persen di bulan Ramadan.

Direktur Kewaspadaan Pangan NFA Nita Yulianis mengungkapkan, pada momentum bulan Ramadan merupakan bulan baik untuk menyosialisasikan Gerakan Selamatkan Pangan dengan melibatkan pemuka agama sekaligus aksi berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Pada tahun 2023 lalu NFA menginisiasi gerakan Ramadan Ceria Pangan yang merupakan salah satu langkah sosialisasi dan aksi penyelamatan pangan dengan menyasar segmen generasi muda terutama pelajar di pusat dan daerah. Pada momentum Ramadan tahun ini, kami kembali mengajak provinsi dan kabupaten/kota untuk terus mengencarkan sosialisasi dan aksi penyelamatan pangan melalui kegiatan Ramadan Ceria Pangan berkolaborasi dengan mitra pentahelix”, ujar Nita.

“Penyebarluasan Gerakan Selamatkan Pangan sejak tahun 2022 disambut baik oleh pemerintah di tingkat daerah. Hal ini terbukti dengan munculnya praktik – praktik baik upaya penyelamatan pangan dan komitmen kepala daerah melalui instruksi dan surat edaran kepala daerah tentang pentingnya mencegah dan mengurangi susut dan sisa pangan”, tambah Nita. Sejak tahun 2023, sebanyak 14 provinsi dan 16 kabupaten/kota yang telah mengeluarkan instruksi ataupun surat edaran mengenai pentingnya mencegah dan mengurangi susut dan sisa pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Ramdhan Pade mengungkapkan sejak tahun 2023 telah menginisiasi kegiatan penyelamatan pangan melalui alokasi APBD bekerja sama dengan mitra swasta,

"Masalah pemborosan pangan di Provinsi Gorontalo cukup tinggi, sementara masih banyak masyarakat yang kekurangan pangan, untuk itu kami melakukan kegiatan penyelamatan pangan sebagai salah satu upaya mengatasi masalah kerawanan pangan." ujar Ramdhan.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam kesempatan berbeda menegaskan, upaya penyelamatan pangan yang berfokus pada penurunan susut dan sisa pangan harus terus digaungkan. Komitmen pemerintah dalam hal ini ini harus terwujud melalui sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak terkait,

"Dalam beberapa tahun terakhir inisiasi kita bersama dengan stakeholder pangan dalam gerakan penyelamatan pangan menunjukkan komitmen bersama untuk menurunkan tingkat food waste yang tentunya dalam jangka panjang akan berdampak pada ketahanan pangan kita. Saya mengimbau kepada semua pihak untuk stop boros pangan, demi ketahanan pangan kita yang berkelanjutan." ungkap Arief.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Sekretariat Utama pada periode bulan Februari 2025 sebagai berikut:

1. Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama adalah Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional sebesar Rp. 110,754,211,000,- dari total pagu Badan Pangan Nasional sebesar Rp. 158,632,651,000,- yang terdiri dari 6 Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan 15 Rincian Output (RO).
2. Realisasi keuangan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional pada bulan Februari 2025 mencapai Rp. 8,406,184,240 (179.43%) dari target sebesar 4,684,903,125 (4,23%)

4.2 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi di Sekretariat Utama adalah masih rendahnya realisasi anggaran pada beberapa MAK, bahkan ada yang masih 0 realisasinya pada awal tahun dikarenakan anggaran masih belum bisa digunakan pada saat awal tahun.

4.3 Rekomendasi

Tindak lanjut atas permasalahan di atas antara lain:

1. Penyelesaian dokumen pendukung sebagai syarat pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari alokasi ABT Badan Pangan Nasional Tahun 2025.
2. Penyiapan SDM yang akan menangani pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi untuk mendorong realisasi keuangan dapat mencapai target yang telah direncanakan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. DIPA Revisi 1 Tanggal 21 Februari 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 125.01.1.690590/2025



05.90714053-0000-7731

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (125) | BADAN PANGAN NASIONAL |
| 2. Unit Organisasi | : (01) | BADAN PANGAN NASIONAL |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (690590) | BADAN PANGAN NASIONAL |
| Sebesar | : Rp. | 275.718.455.000 (DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA MILIAR TUJUH RATUS DELAPAN BELAS JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
04 EKONOMI
04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Revisi ke 01

Tanggal : 21 Februari 2025

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

	Rp.		Rp.		Rp.	Jumlah Uang
1. Rupiah Murni		275.718.455.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		0	
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri		0	
PNBP TA Berjalan		0	- Hibah Dalam Negeri		0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		0	5. Hibah Langsung		0	
- Pinjaman Luar Negeri		0	- Hibah Luar Negeri Langsung		0	
- Hibah Luar Negeri		0	- Hibah Dalam Negeri Langsung		0	
D. Pencairan dana dilakukan melalui :			6. SBSN PBS		0	
1. KPPN JAKARTA V	(130)	Rp.	275.718.455.000			

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
SUHAHASIL NAZARA
NIP. 197011231990031009

Lampiran 2. Realisasi Sekretariat Utama Bulan Februari 2025

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PANGAN NASIONAL PUSAT
Data s/d tanggal 28 Februari 2025

URAIAN	PAGU REVISI	PAGU BLOKIR	REALISASI SP2D	%	REALISASI AKRUAL	%	SISA ANGGARAN
JUMLAH SELURUHNYA	158,632,651,000	15,220,743,000	9,977,745,098	6.29%	16,908,703,628	10.66%	148,654,905,902
WA Program Dukungan Manajemen	110,754,211,000	2,830,507,000	8,406,184,240	7.59%	15,301,342,770	13.82%	102,348,026,760
WA.6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	110,754,211,000	2,830,507,000	8,406,184,240	7.59%	15,301,342,770	13.82%	102,348,026,760
AEC Kerja sama	924,972,000	225,704,000	1,458,000	0.16%	1,458,000	0.16%	923,514,000
AEC.001 Kerja Sama Bidang Pangan	924,972,000	225,704,000	1,458,000	0.16%	1,458,000	0.16%	923,514,000
101 Kerja Sama Bidang Pangan	924,972,000	225,704,000	1,458,000	0.16%	1,458,000	0.16%	923,514,000
101.0A Kerjasama di Bidang Pangan	924,972,000	225,704,000	1,458,000	0.16%	1,458,000	0.16%	923,514,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	92,278,939,000	966,513,000	7,342,152,084	7.96%	11,458,593,874	12.42%	84,936,786,916
EBA.956 Layanan BMN	525,011,000	200,000,000	45,580,000	8.68%	45,580,000	8.68%	479,431,000
101 Layanan BMN dan Pengadaan	525,011,000	200,000,000	45,580,000	8.68%	45,580,000	8.68%	479,431,000
101.0A Layanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	353,140,000	200,000,000	20,580,000	5.83%	20,580,000	5.83%	332,560,000
101.0B Layanan Pengelolaan BMN	171,871,000	0	25,000,000	14.55%	25,000,000	14.55%	146,871,000
EBA.957 Layanan Hukum	686,492,000	0	11,185,000	1.63%	11,185,000	1.63%	675,307,000
101 Layanan Hukum	686,492,000	0	11,185,000	1.63%	11,185,000	1.63%	675,307,000
101.0A Layanan Hukum	351,350,000	0	11,185,000	3.18%	11,185,000	3.18%	340,165,000
101.0B Layanan Advokasi Hukum	181,542,000	0	0	0.00%	0	0.00%	181,542,000
101.0C Layanan Penguatan JDIIH, IRH dan IKK	153,600,000	0	0	0.00%	0	0.00%	153,600,000
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2,673,720,000	469,013,000	115,821,815	4.33%	263,881,826	9.87%	2,557,898,185
101 Layanan Hubungan Masyarakat	2,673,720,000	469,013,000	115,821,815	4.33%	263,881,826	9.87%	2,557,898,185
101.0A Layanan Humas dan Informasi Publik	2,673,720,000	469,013,000	115,821,815	4.33%	263,881,826	9.87%	2,557,898,185
EBA.959 Layanan Protokol	580,600,000	49,500,000	113,039,052	19.47%	114,398,052	19.70%	467,560,948
101 Layanan Protokol	580,600,000	49,500,000	113,039,052	19.47%	114,398,052	19.70%	467,560,948
101.0A Layanan Keprotokoliran	580,600,000	49,500,000	113,039,052	19.47%	114,398,052	19.70%	467,560,948
EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,270,261,000	200,000,000	24,258,000	1.91%	24,258,000	1.91%	1,246,003,000
101 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,270,261,000	200,000,000	24,258,000	1.91%	24,258,000	1.91%	1,246,003,000
101.0A Layanan Manajemen Organisasi dan Tatalaksana	433,620,000	0	4,158,000	0.96%	4,158,000	0.96%	429,462,000
101.0B Layanan Reformasi Birokrasi	188,150,000	0	20,100,000	10.68%	20,100,000	10.68%	168,050,000
101.0C Pengembangan Jabatan Fungsional	648,491,000	200,000,000	0	0.00%	0	0.00%	648,491,000
EBA.962 Layanan Umum	7,844,720,000	48,000,000	413,319,652	5.27%	768,474,652	9.80%	7,431,400,348
101 Layanan Umum	7,844,720,000	48,000,000	413,319,652	5.27%	768,474,652	9.80%	7,431,400,348
101.0A Layanan Rumah Tangga Pimpinan	3,841,627,000	48,000,000	315,279,652	8.21%	614,979,652	16.01%	3,526,347,348
101.0B Layanan Dukungan Kesekretariatan	3,064,880,000	0	58,040,000	1.89%	111,695,000	3.64%	3,006,840,000
101.0C Layanan Tata Usaha Biro	330,560,000	0	0	0.00%	0	0.00%	330,560,000
101.0D Layanan Tata Usaha Pimpinan	298,413,000	0	40,000,000	13.40%	41,800,000	14.01%	258,413,000
101.0E Layanan Persuratan dan Kearsipan	309,240,000	0	0	0.00%	0	0.00%	309,240,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	78,698,135,000	0	6,618,948,565	8.41%	10,230,816,344	13.00%	72,079,186,435
001 Gaji dan Tunjangan	62,254,305,000	0	5,404,786,565	8.68%	7,004,602,344	11.25%	56,849,518,435
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	62,254,305,000	0	5,404,786,565	8.68%	7,004,602,344	11.25%	56,849,518,435
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	16,443,830,000	0	1,214,162,000	7.38%	3,226,214,000	19.62%	15,229,666,000
002.0A Administrasi Kegiatan	1,224,388,000	0	118,850,000	9.71%	118,850,000	9.71%	1,105,538,000
002.0B Terpeliharanya Kendaraan	2,248,257,000	0	0	0.00%	0	0.00%	2,248,257,000
002.0C Terbayarnya Layanan Telepon dan Listrik	906,000,000	0	0	0.00%	0	0.00%	906,000,000
002.0D Tenaga Teknis Lainnya	6,120,340,000	0	537,352,000	8.78%	2,549,404,000	41.65%	5,582,988,000
002.0E Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,880,095,000	0	557,960,000	9.49%	557,960,000	9.49%	5,322,135,000
002.0F Pelantikan Jabatan	64,750,000	0	0	0.00%	0	0.00%	64,750,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,314,054,000	0	0	0.00%	695,307,060	52.91%	1,314,054,000
EBB.951 Layanan Sarana Internal	1,314,054,000	0	0	0.00%	695,307,060	52.91%	1,314,054,000
101 Layanan Sarana Internal	1,314,054,000	0	0	0.00%	695,307,060	52.91%	1,314,054,000
101.0A Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1,314,054,000	0	0	0.00%	695,307,060	52.91%	1,314,054,000
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1,887,686,000	0	15,187,500	0.80%	15,187,500	0.80%	1,872,498,500
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	1,887,686,000	0	15,187,500	0.80%	15,187,500	0.80%	1,872,498,500
101 Layanan Manajemen SDM Internal	1,887,686,000	0	15,187,500	0.80%	15,187,500	0.80%	1,872,498,500
101.0A Layanan Manajemen SDM	397,606,000	0	1,937,500	0.49%	1,937,500	0.49%	395,668,500
101.0B Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1,228,930,000	0	0	0.00%	0	0.00%	1,228,930,000
101.0C Layanan koordinasi dan pembinaan kegiatan organisasi, SWM dan Hukam	261,150,000	0	13,250,000	5.07%	13,250,000	5.07%	247,900,000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,623,226,000	1,638,290,000	802,896,044	7.56%	1,016,305,724	9.57%	9,820,329,956
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6,129,682,000	1,211,000,000	85,935,593	1.40%	292,100,273	4.77%	6,043,746,407
101 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6,129,682,000	1,211,000,000	85,935,593	1.40%	292,100,273	4.77%	6,043,746,407
101.0A Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6,129,682,000	1,211,000,000	85,935,593	1.40%	292,100,273	4.77%	6,043,746,407
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	771,904,000	127,290,000	32,379,267	4.19%	39,624,267	5.13%	739,524,733
101 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	771,904,000	127,290,000	32,379,267	4.19%	39,624,267	5.13%	739,524,733
101.0A Layanan Pemantauan dan Evaluasi	771,904,000	127,290,000	32,379,267	4.19%	39,624,267	5.13%	739,524,733
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1,394,046,000	300,000,000	265,652,900	19.06%	265,652,900	19.06%	1,128,393,100
101 Layanan Manajemen Keuangan	1,394,046,000	300,000,000	265,652,900	19.06%	265,652,900	19.06%	1,128,393,100
101.0A Layanan Perbendaharaan	678,141,000	300,000,000	98,052,900	14.46%	98,052,900	14.46%	580,088,100
101.0B Layanan Akuntansi dan Verifikasi	383,850,000	0	73,600,000	19.17%	73,600,000	19.17%	310,250,000
101.0C Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	182,734,000	0	30,000,000	16.42%	30,000,000	16.42%	152,734,000
101.0D Layanan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan	149,321,000	0	64,000,000	42.86%	64,000,000	42.86%	85,321,000
EBD.965 Layanan Audit Internal	2,327,594,000	0	418,928,284	18.00%	418,928,284	18.00%	1,908,665,716
101 Layanan Audit Internal	2,327,594,000	0	418,928,284	18.00%	418,928,284	18.00%	1,908,665,716
101.0A Layanan Internal	406,834,000	0	0	0.00%	0	0.00%	406,834,000
101.0B Audit pada Satker lingkup Badan Pangan Nasional	560,000,000	0	86,228,135	15.40%	86,228,135	15.40%	473,771,865
101.0C Reviu kegiatan mandatori dan kegiatan strategis pada satker kelompok Badan Pangan Nasional	224,000,000	0	100,863,864	45.03%	100,863,864	45.03%	123,136,136
101.0D Tindak lanjut Hasil Pengawasan Internal/ External	152,000,000	0	10,545,100	6.94%	10,545,100	6.94%	141,454,900
101.0E Pemantauan atas penerapan SPI pada unit kerja lingkup badan	67,460,000	0	0	0.00%	0	0.00%	67,460,000
101.0F Pemantauan penerapan SPI Yemogas 1 (Pemeriksaan mandiri maturitas SPID/penjaminan Kualitas Maturitas SPID)	120,000,000	0	0	0.00%	0	0.00%	120,000,000
101.0G Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis/Prioritas	240,000,000	0	221,291,185	92.20%	221,291,185	92.20%	18,708,815
101.0H Penyusunan NSPK	61,300,000	0	0	0.00%	0	0.00%	61,300,000
101.0I Reviu Bantuan Pangan	496,000,000	0	0	0.00%	0	0.00%	496,000,000
PAD Peraturan Presiden	270,775,000	0	0	0.00%	0	0.00%	270,775,000
PAD.001 RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	270,775,000	0	0	0.00%	0	0.00%	270,775,000
101 Penyusunan RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	270,775,000	0	0	0.00%	0	0.00%	270,775,000
101.0A Penyusunan RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	270,775,000	0	0	0.00%	0	0.00%	270,775,000
QMA Data dan Informasi Publik	3,232,560,000	0	219,035,125	6.78%	2,089,035,125	64.63%	2,913,524,875
QMA.001 Data dan Informasi Pangan	3,232,560,000	0	219,035,125	6.78%	2,089,035,125	64.63%	2,913,524,875
101 Layanan Data dan Informasi Pangan	3,232,560,000	0	219,035,125	6.78%	2,089,035,125	64.63%	2,913,524,875
101.0A Peningkatan Layanan Jaringan dan Sistem Informasi	2,837,423,000	0	214,362,749	7.56%	2,084,362,749	73.47%	2,623,060,251
101.0B Peningkatan Layanan Data dan Informasi	395,137,000	0	4,672,376	1.18%	4,672,376	1.18%	390,464,624
UAB Sistem Informasi Pemerintahan	221,999,000	0	25,455,487	11.47%	25,455,487	11.47%	196,543,513
UAB.001 Sistem Informasi Pangan dan Gizi	221,999,000	0	25,455,487	11.47%	25,455,487	11.47%	196,543,513
101 Sistem Informasi Pangan dan Gizi Terintegrasi	221,999,000	0	25,455,487	11.47%	25,455,487	11.47%	196,543,513
101.0A Pengelolaan Sistem Informasi Pangan	221,999,000	0	25,455,487	11.47%	25,455,487	11.47%	196,543,513